

EKLESIOLOGI PROFETIK PADA ISU-ISU ETIS KERAKYATAN KRISTEN: REFLEKSI INJILI

Togardo Siburian

Dosen Sekolah Tinggi Teologi Bandung

togardo_siburian@yahoo.com

Abstrak: *Tulisan ini ingin berefleksi injili atas relasi negara dan gereja di dalam situasi masyarakat profetik yang menderita, teraniaya, termarginal, terabaikan, dll. Selama ini, pemahaman doktrinal warga gereja gamang mengenai status dan peran orang Kristen secara politis. Ada tiga pandangan hubungan negara dan gereja: (1) Pandangan subordinasionisme gereja di bawah negara memposisikan ketaatan gereja sebagai posisi bawah atau sebaliknya negara di bawah Gereja karena alasan taat kepada Allah. (2) Pandangan dualisme di mana jalan sendiri-sendiri, baik secara paralel dan konfrontatif. (3) Pandangan koordinasi di antara keduanya di bawah kuasa Allah dengan natur dan tujuan sendiri namun berhubungan secara proporsional. Sebagai titik koordinat relasi pada pribadi-pribadi Kristen sebagai warga gereja dan Negara. Berdasarkan relasi koordinasi pada dwi kewargaan itulah ada penghubung antara dua lembaga buatan Allah itu secara dialog konsultatif mengenai masyarakat dan dunia. Inilah kesempatan bereklesiologi injili lanjutan pada isu-isu kemanusiaan melalui nilai-nilai etis Injil Kerajaan. Kajian ini dilakukan dengan metode pustaka.*

Kata kunci: Hubungan, koordinasi gereja-negara, kristiani, dwi kewargaan, masyarakat, profetik

Abstracts: *This article wants to have an evangelical reflection on the relationship between the state and the church in a situation of a prophetic society, which is suffering, persecuted, marginalized, neglected, etc. So far, the doctrinal understanding of church members is giddy about the political status and role of Christians. There are three views of the relationship between the state and the church: (1) The subordinationism view of the church under the state positions church obedience as the lower position or vice versa, the state is under Greja for reasons of*

obeying God. (2) The dualism view where the path itself is both parallel and confrontational. (3) The coordination view between the two is under the power of God with its own nature and purpose but is proportionately related. As the coordinate point of the relationship in the Christian person as a member of the church and the State. Based on the coordination relationship between the two citizenship, there is a link between the two institutions made by God in a consultative dialogue about society and the world. This is the opportunity for an advanced evangelical ecclesiology on humanitarian issues before the church and the state, based on the ethical values of the Kingdom's gospel. This study was conducted using the library method.

Keywords: Relationship, church-state coordination, christianity, dual citizenship, community, prophetic

PENDAHULUAN

Secara sisi institusional gereja hidup berdampingan dengan institusi dunia lain seperti negara. Di mana kedua institusi itu dibentuk oleh Allah sendiri dengan natur dan tugas serta cara kerjanya masing-masing di dalam dan bagi dunia. Namun eklesiologi selama ini kurang membawa pemahaman doktrin gereja yang konprehensif pada isu-isu sosial politik. Selama pemahaman dua hakekat keberadaan orang Kristen ini kurang terpahami secara jernih dan jelas, maka warga gereja akan gamang terus dalam bersuara profetiknya. Terlepas dari pilihan paham doktrinalnya, banyak orang Kristen gagal paham melihat posisinya sebagai warga gereja di dalam dunia politik. Untuk itu dibutuhkan pengertian teologis yang sehat tentang status dan hubungan keduanya.

Gereja lokal tidak bisa dibangun tanpa kehidupan bermasyarakat yang multi dimensional. Pelayanan profetik adalah salah satu peran gereja di tengah-tengah dunia dan masyarakatnya, didasarkan pada realisme ajaran firman alkitabiah yang berfokus pada inkarnasi Kristus dan pemeliharaan Allah. Tugas kenabian bukanlah soal historik masa lalu dan apokaliptik masa depan saja,

namun soal kekinian peradaban ini. Kaum injili harus berani mengartikulasikan ulang eklesiologinya dalam pergumulan sosial politik, sehingga warga gereja dapat memahami posisi secara sehat.

Kajian ini akan melihat prinsip koordinasi negara dan agama atau pemerintah dan gereja sebagai kesempatan bagi panggilan masuk tugas kenabian gereja, demi kemanusiaan. Prinsip politik ini membutuhkan pemikiran terbuka dari kaum injili untuk berjuang dan menderita. Tulisan ini mau masuk melalui perspektif etis untuk pembebasan bagi yang tertindas, termasuk gereja-gereja sendiri.

KONTEKS PROFETIK BAGI GEREJA-GEREJA KEKINIAN

Konteks profetik di sini adalah situasi masyarakat di mana gereja-gereja berdiri sebagai komunitas yang unik —sosial dan spiritual— menghadapi krisis kemanusiaan dalam ketertindasan, keteraniayaan, terpinggirkan, terabaikan, terbuang, dan lain lain yang menyedihkan rasa kemanusiaan.

Karakteristik Bermasyarakat dari Gereja

Menurut Kirkpatrick “Since ‘Community’ means essentially a group of some kind living together, we all live in multitude of communities. We use the word “community in everyday discourse to refers to any social grouping”.¹ Dari jalan pikir itu, gereja-gereja adalah suatu komunitas sosial. Selanjutnya, ada tiga model dasar komunitas yang dapat ditarik secara historis dari filsafat sosial dan agama: (1) “Atomistic/contractarian” sebagai atom-atom independen yang berkontrak satu dengan lainnya untuk menguatkan relasi. (2) “Organic/ functional” sebagai organ-organ interdependen secara fungsional berhubungan satu dengan lainnya di dalam organisme yang lebih besar. (3) “Mutual/personal” person-person unik dan saling menemukan pemenuhan yang dimengerti sebagai komunitas secara mutualistik melalui kehidupan untuk yang lainnya dalam suatu

¹ Frank Kirkpatrick, *Community: A Trinity Models* (Georgetown University Press, 1986), 2.

persekutuan.² Namun pengertian ketiga ini lebih cocok gereja sebagai komunitas sosial yang rohani, seperti yang digambarkan sebagai Tubuh Kristus. Ini adalah komunitas unik yang ada di tengah-tengah dan bersama komunitas lainnya secara mutual dan fungsional dalam suatu masyarakat bangsa dan negara. Apalagi komunitas jenis pertama, ternyata muncul kegagalan fungsi dari komunitas atomistik dalam memenuhi kebutuhan sosial anggotanya, maka model organik menjadi pilihan yang paling memadai untuk menciptakan komunitas keseluruhan dari bagian-bagiannya.³

Secara khusus, komunitas gereja berada dalam masyarakat (society) yang lebih luas dan plural, di mana gereja sebagai kumpulan dari dua atau lebih individu dalam suatu daerah tertentu harus berinteraksi dengan kelompok sub agama Kristen. Sebagai anggota masyarakat harus terlibat secara interaktif dengan komunitas lain yang lebih besar secara demografis, geografis, dan historis. Walau komunitas gereja tetap mengingat identitas kekhususan sebagai kelompok iman tertentu, di mana orang Kristen menjadi “rakyat” yang menekankan aspek tujuan penduduk suatu negara yang mementingkan kehendak umum dari keseluruhan penduduk. Term ini terkait langsung sebagai “warga-negara” dalam suatu Negara berdaulat yang biasanya ditandai oleh tanda identitas secara legal dan konstitusional. Artinya, unsur warga gereja adalah warga negara yang terkait pada soal nasib bersama dalam kesatuan hidup saudara sebangsa, disebut nasionalisme. Singkatnya, perjuangan gereja-gereja di masyarakat bergerak dalam politik etis bukan politik praktis yang menekankan nilai moral daripada kuasa (power).

Gereja sebagai Komunitas Profetik dalam Masyarakat

Secara khusus di dalam masyarakat bangsa, gereja berfungsi sebagai suatu komunitas profetik, di mana secara umum dimengerti sebagai umat Allah yang peka dan simpati akan situasi kepada individu dan

² Ibid., 2.

³ Ibid., 233.

komunitas “lain”. Pelayanan profetik gerejawi adalah sejenis panggilan khusus untuk memperjuangkan hak-hak yang tertindas, kaum marginal, dan minoritas karena mengalami ketidakadilan sosial, politik, ekonomi sama seperti Yesus di zaman-Nya. Bahkan realitas komunitas profetik bagi gereja adalah menderita dan teraniaya karena imannya kepada Kristus. Itu sudah terjadi sejak permulaan gereja, di dalam sejarahnya. Sejak dulu kondisi penganiayaan gereja diungkapkan sebab-sebabnya sebagai berikut: agama, politik, ekonomi, dan sosial.⁴ Dari empat bidang perspektif kenabian gereja sekarang, kekerasan karena agama lebih dominan dan alasan politik hanya pelengkap dan penguat agar penganiayaan dapat berjalan mulus demi menolak kekristenan dan menyingkirkan gereja. Itulah sebabnya, dalam bahasa Inggris kata “*prophetic*” diartikan sebagai keadaan menyedihkan, menghinakan, atau mempermalukan karena suatu hal yang mengejek. Namun bagi pejuang profetik Kristen, ini mengagumkan dan mulia berdasarkan pengorbanan Kristus.

Belajar dari orang non Kristen, kita mendapatkan pengertian keagamaan “kenabian” yang kuat karena diperlawanan tidak sama dengan “keimaman”. Di dalam komunitas agama, pendekatan profetik bergerak “dari bawah ke atas” berlawanan dengan pendekatan keimaman yang bergerak “dari atas ke bawah”⁵ sebagai sesuatu yang berbeda dan berlawanan arah operasionalnya dalam masyarakat agama. Walau Syahputera dalam tema komunikasi hanya menyamakan “profetik” dengan “persuasif” semata, (berdasarkan QS Ali Imran 104 dan 11).⁶ Penyamaan itu terlalu menyederhanakan dan mengurangi kekentalan makna kesaksian perjuangan bagi masyarakat tertindas. Namun pendekatan keimaman

⁴ David H Adenay, “Penganiayaan Gereja,” *Gereja Zaman Perjanjian Baru dan Masakini*. terj., (Malang: Gandum Mas: 1997), 314.

⁵ Lih. “Pendahuluan” HM Amin Abdulah dalam Iswandi Syahputera, *Komunikasi Profetik: Konsep dan Pendekatan* (Yogyakarta: Simbiosis Rekatama Media, 2007), iii-v.

⁶ Syahputera, *Komunikasi Profetik*, 104 selanjutnya membedakan persuasif dari verbal, gosip dan debat (105 dst).

memang tidak produktif dalam masyarakat sipil yang menderita dan tertindas, sekaligus rawan dipakai oleh para imam agama untuk menekan umat, karena interes sentimen pribadi terhadap orang yang berbeda. Hal ini pun pernah dihadapi oleh Yesus sendiri dari para Ahli Taurat dan menjadi korban oleh para imam-imam petinggi lembaga tersebut karena dianggap “orang lain”.

Selanjutnya pada masa kini, gereja yang benar harus dilihat secara khusus pada “prophets crying in the wilderness rather than church councils preoccupied with survival on the church as a social institution.”⁷ Memang pelayanan kenabian selalu terhina dalam pembelaan orang-orang terhina, sama seperti yang dialami Kristus sendiri sebagai “Kepala Gereja” ketika di bumi. Bahkan sebenarnya gereja-gereja sebagai “yang lemah” adalah penderita karena mengikut Kristus. Jabatan kenabian Kristus masih ditinggalkan dalam gereja-gereja sampai masa kini, setelah kenaikan-Nya ke sorga sebagai Tuhan; sekaligus sebagai teladan praksis pengorbanan-Nya dan gereja mula-mula untuk disuarakan berdasarkan belas kasihan Kristus. Doktrin gereja sekarang memasukan keprihatinan hidup manusia dalam pengakuan-pengakuan kontemporer demikian:

“A confession of faith may well involve critique of both society and religion. It will seek not only to hear the word of God in the scripture but also to discern the hand of God in the tomes. It will proceed from the Words to the world, refusing to drived its agenda from the world but rather endeavoring to apply Gods agenda to the world.”⁸

Di sini tugas kenabian injili memang harus menimbang bahwa “Gospel had to be more than evangelism.”⁹ Pendapat ini bukannya tidak beralasan dalam gerakan misi injili, khususnya di Perjanjian Lausanne, melihat *evangelism* adalah bagian kecil dari *world evangelization*. Ini tidak sama seperti anggapan ekstrim injili yang kurang membaca perjanjian secara konprehensif, khususnya dalam

⁷ Donald G. Bloesch, *The Church: Sacraments, Worship, Ministry and Mission* (Downers Grove: InterVarsity Press, 2002), 268.

⁸ Bloesch, *The Church.*, 268.

⁹ John Perkins *With Justice for God* (Ventura: Regal Books, 1984), 22-23.

frasa yang menyentak injili, “evangelism is not enough”. Beberapa dosen misi yang ketinggalan pemikiran, berpandangan bahwa Injil gerejawi tereduksi menjadi *evangelism* saja sebagai satu-satunya tugas gereja sehingga mengabaikan pentingnya tugas lain, seperti: kerygma, koinonia, diakonia, dan marturia pada konteks krisis kenabian masyarakat.

Ini adalah soal pemberitaan firman Injil untuk menantang denominasionalisme sempit yang didasarkan pada eksklusivisme gereja dan mengkhianati hakikat gereja universal dalam persekutuan organik Tubuh Kristus. Paling tidak, masalah kenabian masyarakat ini pernah membahas situasi krisis masyarakat secara panjang lebar oleh negarawan seperti Abraham Kuyper dengan menggambarkan lengkap, tanpa menyebutkan istilahnya (“kenabian”).

“Pemerintah bertanggungjawab secara langsung mengenai hal-hal ini melalui berbagai kebijaksanaan [internal], mengatur masyarakat sipil... Manusia memerlukan pimpinan dalam mengarahkan diri pada kesejahteraan hidup bersama. ... namun demikian... — kita tidak boleh lupa bahwa kepemimpinan manusia — seringkali didasarkan atas prinsip-prinsip yang salah, sehingga mengakibatkan problema-problema sosial yang tidak semestinya. “Ketidakadilan di antara manusia telah menghasilkan dunia di mana yang kuat menindas yang lemah sedemikian rupa, sehingga seolah-olah kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak beradab ketimbang kehidupan yang beradab. Mereka yang kuat, tanpa kecuali, selalu tahu bagaimana cara membengkokkan hukum dan undang-undang, sehingga mereka dapat meraih keuntungan yang sebesar mungkin tanpa mempedulikan kerugian yang dialami mereka yang lemah. Memang manusia, tidak secara harafiah memakan manusia lainnya, seperti masyarakat kanibal...Di dalam masyarakat yang tidak lagi menghargai keadilan, mereka yang lebih kuat memanfaatkan yang lebih lemah dengan cara-cara yang sering kali tidak dapat dihindari oleh kelompok yang lebih lemah. Dan setiap kali penegak hukum berusaha mengatasi hal ini, dengan kesadaran akan tanggungjawab kepada Allah untuk melindungi yang lemah, maka semakin hal ini membuat kelompok yang lebih kuat tahu bagaimana cara memanipulasi

pemerintah, — yang semestinya melindungi yang lemah — untuk menjadi boneka ditangan mereka.”¹⁰

Gereja sebagai Komunitas Misional

Aspek misional gereja adalah kaitan langsung dari aspek profetis di atas. Apa yang disebut oleh John Driver sebagai pentingnya untuk memunculkan kembali “misi profetik”¹¹ di atas yang terkait sekaligus dengan konsep “teologi misional”¹² bagi gereja-gereja, untuk merefleksi secara baru bidang-bidang kehidupan kritis sekarang. Di sini pentingnya memanggil kembali prinsip-prinsip misional bagi gereja di tengah-tengah dunia yang penuh dengan orang-orang tersisih, minoritas, dan lapar, serta tertindas. Ini adalah panggilan misi peradaban manusia yang mencakup unsur mandat budaya dan mandat Injil secara holistik dan seimbang tentang “syalom”. Gereja-gereja injili yang mengutamakan aktivitas misi keselamatan dianggap gagal untuk memahami pemberitaan Injil yang otentik, karena hanya melayani diri sendiri demi menguatkan internalnya.

Kata “misional” adalah suatu sifat kehidupan gereja di dalam kesehariannya. Ini adalah gerakan anggota komunitas gerejawi sebagai murid Kristus. Artinya, mobilisasi kehidupan di tengah lingkungan gereja adalah misi Allah yang bersifat menjangkau orang luar secara wajar, karena terkesan akan kasih Kristus dalam sikap anak-anak gereja, lalu masuk ke dalam gereja karena iman anugerah.¹³ Inilah makna singkat gereja misional masa kini. Walau

¹⁰ Abraham Kuyper, [*Agama*] *Kristen dan Problematika Sosial*, terj. (Surabaya: Momentum, 2004), 34 bahkan dikatakannya, “Situasi ketidakadilan seperti digambarkan di atas telah terjadi sejak dulu. Bahkan Alkitab telah berulang kali menyerukannya [kenabian]” (35-36) (tanda kurung dari saya dengan memperhatikan seluruh halaman).

¹¹ John Driver, *Gambaran Gereja dalam Misi* (Bandung: Penerbit STT Bandung, 2010), 226 dst.

¹² Howard A. Snyder, *Global Good News Mission in A New Context* (Nashville: Abingdon Press), 54 dst.

¹³ Neil Hudson, *Gereja Idaman Gereja Pemuridan*, terj., (Surabaya: Perkantas Jatim, 2017), 14-21.

konsep ini dipandang sebagai proyek utopia dan khayalan oleh pascakristen Eropa, namun ini adalah suatu yang benar secara ajaran alkitabiah dan sangat beradab dalam misi masa kini yang penuh konflik antar umat beragama. Konsep misional bukanlah selalu misioner, pergi keseberang lautan dan suku-suku terpencil, tetapi juga di kota dan masyarakat sekitar gereja, sebagai suatu strategi misi yang baru mengenai “Pergilah jadikan segala bangsa” dan “sampai ke ujung bumi”. Sekarang ini, bangsa-bangsa dari ujung bumi dapat datang ke kota-kota besar dan menjadi tempat menjadikan murid Kristus.

Sifat misional adalah karakter dasar gereja-gereja di dalam dunia, bukan kehendak eksklusivisme sebagai suatu agama yang hanya mengupayakan penambahan kuantitas. Gerakan misional gereja adalah promosi solidaritas sosial masyarakat luas, khususnya dapat terkait dengan tri tugas gereja (diakonia, marturia, dan koinonia). Di sini keberadaan gereja-gereja melayani sebagai agen kontrol sosial dan keprihatinan sosial pada situasi riil yang dihadapi masyarakat. Semuanya itu dalam pengaruh moral Kristen bukan pengaruh kekuasaan politik. Kalaupun aksi sosial Kristen dilakukan harus memahami tugasnya bukan sekedar provokasi dan ‘kaget-kagetan’ untuk kepentingan sesaat saja, tetapi keprihatinan mendalam dan jangka panjang. Di sini konsep kenabian gereja yang ditangkap dari kritik Ron Sider terhadap negara Kristen kaya, “in the age of hunger Christians of necessity must be radicals nonconformist. But nonconformity is painful, only if we are thoroughly grounded in the scriptural view of possessions wealth and poverty will we be capable of living in obedient lifestyle”¹⁴. Kaum injili memahami apa yang dikatakan Sider sebagai peringatan untuk kembali pada sifat misional gereja di masyarakat, “The powerful evangelistic impact of economic sharing at Jerusalem indicates that god approved and blessed the practice of Jerusalem Church.”¹⁵ Kesaksian komunitas Injil yang

¹⁴ Ronald J. Sider, *Rich Christian in The Age of Hunger* (Downers Groove: InterVarsity, 1977), 27.

¹⁵ *Ibid.*, 110.

demikian tentu berbeda dengan konteks pekabaran Injil yang penuh dengan egoisme transaksional pada dunia yang kelaparan sekarang, oleh Sider dituduh sebagai “a hindrance to evangelism” dan “a desecration of the body of Christ.”¹⁶ Secara keseluruhan, kenabian injili harus menimbang ulang sifat misional gereja mula-mula, di Yerusalem (Kis 2:1-9 4:31-37) ketika di tengah-tengah penindasan sebagai minoritas. Di sini pentingnya wawasan dunia Kristen.

Dalam Eksistensi Gereja Militan

Gereja Kristen sebagai lembaga ilahi bersisi dua sekaligus, spiritual dan sosial, sehingga selalu ada dimensi yang kelihatan dalam dunia ini digambarkan sebagai “gereja militan” adalah gereja yang berjuang sejalan dengan gereja-gereja yang menderita karena mengikut Yesus di dunia.¹⁷ Dan ini sekaligus dapat dinilai sebagai kebalikan dari keberadaan gereja-gereja makmur atau sukses masa kini yang cenderung bisa ikut sebagai penindas. Gereja yang berjuang ditandai dengan gereja teraniaya, berbeda dari “gereja jaya” di sorga kelak. Namun di gereja yang berjuang sebagai “peperangan rohani dengan senjata-senjata rohani” dan “menolak memerangi hak siapapun, termasuk pemerintah yang memaksakan kuasanya atas lembaga-lembaga yang berlainan.”¹⁸ Namun ini bukan berarti di dalam perjuangannya tentang keadilan gereja-gereja tidak dapat menantang pemikiran etisnya di dalam “civil disobedience”, khususnya ketika “pedang pemerintah yang diberikan Allah dipergunakan secara despotic di luar kewenangannya. Ada celah “pembangkangan sipil” yang secara teoritis etis bukan politik praktis kekuasaan, dalam protes soft intelektual, non kekerasan.”¹⁹

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Louis Berkhof, *Teologi Sistematis: Doktrin Gereja*, terj., (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), 25.

¹⁸ Abraham Kuyper, *Ceramah-Ceramah mengenai Calvinisme*, terj., (Surabaya: Momentum, 2005), 121.

¹⁹ Togardo Siburian, “Civil Disobedience: Kasus untuk Etika Sosial Kristen” dalam *Jurnal Teologi Stulos*, Vol. 9 No. 1 (April, 2010): 41.

Eklesiologi injili memandang gereja sebagai “gereja yang berjuang” sejalan dengan “gereja yang menderita” yang harus dilihat sebagai gereja teraniaya di dunia dalam metafora “domba di tengah-tengah serigala.” Sayangnya, dalam gereja-gereja pun bisa jadi ada banyak “serigala di kalangan domba”. Di mana para pengikut palsu menekan pada kondisi “lalang di antara gandum” oleh karena kekuasaan uang dan politik. Ini bukan hanya ketika gereja diperhadapkan pada penganiayaan intoleransi dari mayoritas agama atau pemerintah. Penderitaan karena aniaya adalah sejalan dengan apa yang dikatakan Tuhan sendiri bagi pengikut-Nya akan dibenci dan dianiaya karena nama-Nya (Luk.21:12), dan menganggap sebagai penguatan dan penghiburan dalam tugas gereja. Di sini kaum injili dapat memahami tema penderitaan gereja yang berjuang di dunia ini, sebelum menjadi “gereja yang mulia” di sorga. Ini bukanlah sebagai suatu utopia gereja yang tidak bertanggung-jawab. Maka dalam tugas kenabian injili, “teologi pembebasan” masih dapat dicanangkan sepanjang tidak bersifat revolusiner ala Marxisme. Di sini Hanson dan Hanson menasehatkan pentingnya identitas gereja untuk eklesiologi kekinian kita, demikian:

“The Christian church is always called to be critical of society in the name of Christ, as it as to be critical of itself. The church must be protest against social opression ang fight against it with such weapon as are available and appropriate. But it must do so whithout the hatred, bitterness and undruppulousness of communism... if he did not the world not really be a Christian. So the challenge of liberation theology is a real one, motivated by the best intentions. But it must be faced and overcome.”²⁰

Artinya, gereja harus tetap berdasarkan nilai-nilai moral-etis bukan sosial politis dalam perjuangan kenabiannya dalam pengaruh kebajikan Injil Kerajaan Allah pada masyarakat umum. Gereja-gereja harus menahan keinginan untuk berpolitik praktis demi kekuasaan pemerintah. Berdasarkan panggilan kenabiannya gereja-gereja harus berotokritik, khususnya ketika interes politik warganya

²⁰ A.T Hanson and RPC Hanson, *The Identity of The Church: A Guide to Recognizing the Contemporary Church* (London: SCM Press, 1987), 68.

menunggangi institusi gereja, bahkan para pejabat gereja yang haus kekuasaan juga.

ORANG KRISTEN DALAM BERGEREJA DAN BERNEGARA

Ada kesalahpahaman warga gereja dalam bersikap politik, karena kelemahan memahami ajaran skriptural dan memberlakukan huruf-huruf Alkitab secara terpisah-pisah, tanpa mencari prinsip-prinsip ajaran firman secara keseluruhan dalam sistem teologisnya. Banyak pemimpin Kristen hanya menggunakan kata-kata Alkitab secara literalisme dan menolak makna teologis Alkitab. Tanpa pemahaman wahyu proposisional dalam iman Kristen maka penggunaan kosakata deskriptif Taurat PL akan rawan dijadikan hukum Negara teokrasi.

Relasi Gereja dan Negara

Negara dan Gereja adalah dua institusi yang terpisahkan di dalam masyarakat dan berbeda dalam posisi, tugas, dan sarana pengelolaannya (Lukas 20:25). Namun keduanya dilegitimasi oleh Tuhan dan kuasanya berasal dari Allah (Roma 13:1-6). Bahkan rakyat termasuk orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah (2 Pet 2:13,14). Artinya, secara teologis, Gereja terpisah dari Negara. Namun karena kedua institusi itu berada dalam satu tempat yang sama maka harus terdapat hubungan yang sehat dan proporsional. Di sini berdasarkan pemahaman bahwa ada dua kerajaan di atas bumi ini (gereja dan negara) dengan otoritas masing-masing dari Allah.²¹

Dalam sejarah pemikiran Kristen, relasi Gereja dan Negara adalah suatu isu yang rawan namun menggairahkan sampai sekarang. Walau warga gereja masih sering ambigu dalam bersikap, tidak terkecuali pemimpinnya yang ambivalen. Kedua lembaga buatan Allah itu sudah mengalami ketegangan problematik sejak dulu sampai kini, dalam kategori berikut: 1) kebingungan (in confusion), 2) persaingan (in competition), 3) permusuhan (in conflict). Poin

²¹ Lih.R.K. Harrison, gen. ed., *Encyclopedia of Biblical & Christian Ethics* (Grand Rapids: Baker Book, 2001), 227.

pertama sudah ada sejak abad pertengahan, terkait pengalaman Bizantin dan Eropa modern. Poin kedua berkaitan dengan pengaruh positif dan negatif dari pemikiran dualisme St Agustinus tentang *City of God*.²² Pada poin ketiga konfliknya aktif antara badan lembaga ini, bukan soal worldview antara iman dan non iman saja.

Hal itu dihubungkan dengan pernyataan-pernyataan alkitabiah tentang hubungan antara Kerajaan Allah dan Kerajaan Kaisar dalam prinsip-prinsip both/and antara: 1) Kerajaan Allah sudah datang” dan “berikanlah kepada Kaisar apa yang dimilikinya, 2) Perkataan Yesus tentang keagamaan dulu dan sekarang sudah berbeda dalam gambaran anggur baru dalam kantong baru, 3) Prinsip pembebasan dari tekanan hukum Torat dan biarlah tiap-tiap orang menundukan diri pada penguasa di atasnya dengan alasan pejabat sipil sebagai penguasa di atasnya²³ atau bahkan ada yang menyebutnya “wakil Allah”.²⁴ Memang secara tertentu mungkin pendapat ini betul namun sebagian ayat saja dalilnya, karena wakil Allah di dunia ini adalah Kristus. Sama seperti pejabat gereja sekalipun, pejabat pemerintah adalah mewakili “suara” Allah, walau pemerintah diakui sebagai “melaksanakan penghakiman Allah.”²⁵ Semuanya terkait identitas dan otoritasnya sebagai gereja di dunia dalam isu-isu loyalitas dan integritasnya berhadapan dengan pemerintahan sipil.

Beberapa teori hubungan gereja dan negara yang berakibat pada kehidupan warganegara dalam etika sosialnya, apakah berprinsip berdampingan atau berlawanan atau berbeda saja. Pada masa kini menjadi percakapan kontroversial di kalangan awam gereja, khususnya ketika menghadapi pemilu. Namun ada satu hal yang dapat didalilkan awal, terlepas menerima doktrin “two kingdom”, bahwa keterlibatan gereja dalam “civil affairs” diwakili

²² Clarence L Lee, “Church and State in Tension,” *The Left Hand of God* William H Lazareth, ed., (Philadelphia: Fortress Press, 1976), 31-70.

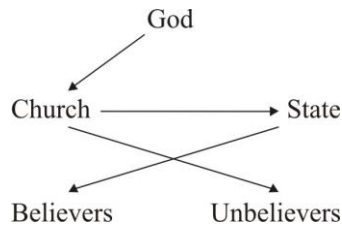
²³ Gerhard A Crodell, “Kingdom of Caesar and Kingdom of God” dalam *Ibid.*, 71-112.

²⁴ David W Hall, *Calvin di Ranah Publik, Demokrasi Liberal dan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Sipil*. terj., (Surabaya: Momentum, 2011), 90.

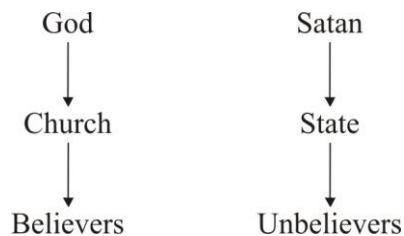
²⁵ *Ibid.*, 93.

oleh “ecclesiastical authorities” dalam “their coordination with civil authorities”²⁶ adalah sesuatu yang dapat dipandang koheren dengan pandangan bahwa pekerjaan pemerintah sipil bersifat rohani juga, sejak dua lembaga dalam masyarakat itu adalah buatan Allah.

John Eidsmoe pernah melihat sistem-sistem politik hubungan gereja dan Negara dalam bagan-bagan berikut ini.²⁷ Pertama, “Gereja di atas negara” dalam arti otoritasnya berasal dari gereja dalam prinsip “dua pedang”, sehingga berakces munculnya agama negara. Secara teologis orang Kristen memandang ada dua kerajaan di atas bumi ini: Kerajaan Allah (diwakili gereja) dan kerajaan dunia (diwakili negara).



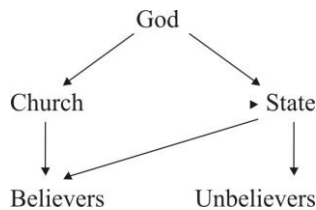
Kedua, pandangan konfrontatif yang melihat Negara sebagai musuh dan alat iblis sehingga melahirkan pandangan: tidak perlu pemilu, tidak jadi pejabat publik atau tentara dan tidak terlibat apapun dalam pemerintahan. Sebaliknya Negara tidak punya kuasa yang riil terhadap orang percaya, walau bukan berarti tidak ada otoritasnya. Secara umum bagannya menjadi:



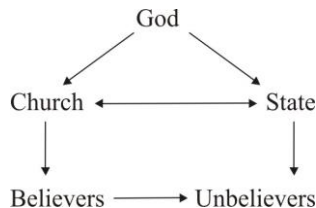
²⁶ Lih. David Van Drunen, *Natural Law and The Two Kingdom : A Study in the Decelopment of Reformed Social Thought* (Grand Rapids: Wm Eerdmans, 2010), 85.

²⁷ Lih. John Eidsmoe, *God & Caesar: Christian Faith and Political Action* (Westchester: Crossway, 1984), 13-15.

Ketiga, ada juga yang memandang Gereja dan Negara masing-masing secara paralel yang terpisah karena berasal dan disahkan oleh Allah. Orang percaya memiliki dua kewargaan: gereja dan negara. Namun gereja tidak berurusan dengan negara dan juga kepada orang tidak percaya. Namun orang Kristen mempunyai hak untuk menggunakan negara dalam mempromosikan kekristenan dan dapat melibatkan prinsip Kristen dalam urusan pemerintahan, sepanjang dapat dibenarkan dengan akal alamiah. Bagan Model menjadi.



Keempat, dalam hal ini orang percaya adalah penduduk dari dua kerajaan tersebut, gereja dan negara, namun otoritas negara atas orang percaya dibatasi pada apa yang Allah berikan kepada Negara, yaitu menjaga ketertiban dan menghukum kriminal. Misi gereja adalah membaharui dunia termasuk negara di dalam batas konsep Kristen dan gereja-gereja dapat memproklamasikan nilai-nilai kenabian Kristen kepada orang lain. Bagannya seperti di bawah.



Prinsip Warga Gereja sebagai Warga Negara

Selanjutnya pandangan Kristen, secara etis pemerintah dibutuhkan untuk: 1) mencegah hukum dosa (Roma 13:3, 4), 2) menghukum orang jahat secara kriminal, 3) memelihara ketertiban (1 Tim 2:1.2)²⁸

²⁸ Eidsmoe, *God & Caesar*. 3, 4.

namun satu poin lagi untuk masa kini, 4) mensejahterakan rakyatnya secara sosial ekonomi. Ketiga tugas umum itulah, pemerintah mengorganisir Negara dan rakyat di dalam bangsa modern dan pluralistik. Tambahan keempat adalah untuk tugas khusus gereja-gereja dalam kenabiannya di masyarakat yang tertindas dan termarginal. Di sini diperlukan keadilan dan perlakuan kesetaraan bagi warga Negara berbeda golongan.

Selanjutnya, konsekuensi logis dari hubungan koordinasi kedua lembaga –Gereja dan Negara—bagi orang Kristen dalam prinsip yang disebut “dwi kewargaan” sebagai warga Negara dan warga gereja di dalam di masyarakat dan secara politik. Artinya, ketika kajian ini harus diteruskan sampai menemukan titik koordinat kedua lembaga itu dalam suatu kuadran yang bersumbu Y (lembaga gereja garis vertical ke atas) dan sumbu X untuk (negara dalam garis horizontal ke samping). Dalam bidang kuadran itulah didapat titik, XY yang diasosiasikan sebagai individu orang Kristen sebagai warga negara dan warga gereja.

Dalam prinsip Negara sekular, warga negara dan pejabat Negara harus beragama, namun bukan berarti negara dan pemerintahan menganut agama tertentu, karena entitas Negara dan pemerintah sebagai lembaga tidak bisa beragama apapun selain memaksakan suatu agama negara dalam Negara agama. Negara sebagai lembaga umum dan kebangsaan nasional melindungi agama apapun yang dianut warganya. Ini yang disebut negara sekular.

Kekristenan memahami prinsip Negara sekular tidaklah bermakna anti agama, tetapi bermakna urusan agama dipisahkan dari urusan politik dan politik tidak menggunakan agama, khususnya dalam “politik identitas” yang diusung juga oleh gereja-gereja tertentu untuk memperjuangkan hak-hak sipilnya. Faktanya, politik warga gereja bukanlah monolitik tetapi pluralistik dalam sejarah, ajaran, denominasi, dan afiliasi gerakan. Tidak ada satupun golongan dan zaman yang dapat mengklaim diri mewakili suara politik Kristen sendirian, kecuali kepercayaan iman akan ketuhanan Kristus. Di sinilah prinsip Gereja yang esa, universal, suci itu berimplikasi dalam

tanda-tanda gereja benar dan terlihat dalam persatuan tugasnya di gereja lokal.

Dengan demikian, warga Kristen dapat menerobos keberadaan kekristenan dalam prinsip kekhususan multireligionisme dari pluralisme agama di masyarakat berdasarkan fakta kesatuan kemanusiaan dan keilahian. Masyarakat modern yang mengakui fakta multi dimensi memperlihatkan adanya kesatuan (unity) di dalam setiap kemajemukan (diversity). Untuk itu prinsip pluralisme agama dalam masyarakat harus ditransform menjadi multi religionisme yang didasarkan dalam Allah Pencipta dan Pemelihara. Dan gereja-gerejanya akan selalu siap untuk prinsip itu, karena berdasarkan ajaran Alkitab tentang Allah, manusia, dan dunia ini. Dengan demikian, gereja-gereja dapat ikut menapaki era reformasi politik ini dengan lebih berani, tanpa fanatisme sempit yang dihasilkan oleh gagasan eksklusivisme Kristen.

Namun pada situasi berkontradiksi prinsip “bukan Negara agama dan bukan Negara sekular” sebagai semboyan absurd, karena ternyata sekarang hanya ada dua pilihan dasar politik yang berlawanan yang harus dipilih, Negara sekular atau Negara agama? Ternyata prinsip ambivalen “bukan Negara agama dan bukan Negara sekular” rawan dipergunakan salah ketika dalil separuh “bukan Negara sekular” untuk aksi intoleransi mayoritas terhadap minoritas. Pancasila ada poin religius pada sila pertama, tetapi bukanlah pada satu agama tertentu, sehingga prinsip dapat ditarik “prinsip bukan Negara agama” tetapi “Negara sekular” yang oleh Nasution dikatakan “kekuasaan Negara harus terpisah secara diametral agar terhindar dari kekuasaan negara yang berdasarkan kedaulatan Allah (theocracy).”²⁹ Walau beliau sendiri mengaku bahwa negara sekular yang konsisten tidak ada sepenuhnya, karena mengakui kebebasan beragama bagi rakyatnya.³⁰ Pendapat terakhir ini suatu kesalahan berpikir, karena eksistensi Negara sekular bukan menolak agama,

²⁹ Lih. Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia sejak Proklamasi hingga Reformasi* (Jakarta: Grafitri Budi Utami, 2004), 262.

³⁰ Ibid.

hanya memisahkan urusan agama dari politik, sehingga Negara sekular berdasarkan Pancasila yang berketuhanan itu bukanlah diartikan “bukan Negara sekular bukan Negara agama”.³¹

Di sini warga gereja tidak perlu alergi dengan natur negara sekular karena dimengerti sebagai “urusan agama dipisahkan dari urusan negara” dan “tugas gereja terpisah dari pemerintah”. Bila dilihat dari konstitusi, Negara sekular harus dimaknai nasionalisme yang mencakup semua kelompok agama di masyarakat dalam prinsip-prinsip pluralisme kebangsaan. Namun warga gereja harus kritis terhadap prinsip negara agama didasarkan hukum agama tertentu yang diadopsi hukum Negara, lalu menjadikannya sebagai agama Negara. Bahkan harus kritis akan yang dinamakan “parpol (identitas) Kristen”.

DWI KEWARGAAN KRISTEN DALAM BERMASYARAKAT PROFETIK

Pribadi-Pribadi Kristen sebagai Titik Koordinat

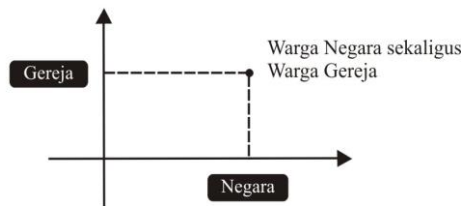
Berdasarkan kerangka pemikiran injili mengenai agama dan politik dimulai dengan keberadaan warga gereja di dalam Negara. Namun di tengah-tengah proses bermasyarakat, hakikat Gereja tetaplah penting untuk dimengerti secara benar demi mengatasi interes oknum pejabat gereja-gereja yang berpandangan politis sempit. Untuk itu saya menolak relasi “atas bawah” dalam prinsip superiorisme saling subordinasi dan memilih prinsip koordinasi pemerintahan sipil dengan gereja-gereja di dalam kesetaraan dan berkonsultasi secara moral etis.

Secara institusi diakui bahwa lembaga Gereja dan Negara dapat mengambil tugas dalam bidangnya masing-masing, Dalam tulisan Abraham Kuyper, hubungan kesetaraan dalam prinsip “gereja yang bebas di dalam negara yang bebas” dalam prinsip “koordinasi gereja

³¹ Ditempat yang berbeda saya telah melihat hal yang sama dalam *Teologi Religionum [Misional]: Pendekatan Injili pada Agama-Agama Lain* (Bandung: Penerbit STT Bandung: 2005).

dan negara.”³² Relasi koordinasi diyakini paling sesuai dengan proporsi kedua lembaga itu masing masing secara proporsional, termasuk peran warga gereja sebagai warga Negara. tersebut. Artinya, Gereja terpisah dari Negara, masih dapat berhubungan konsultatif moral pada titik koordinat pada individu dan komunal Kristen di masyarakat. Di dalam hubungan koordinasi ini dilakukan secara konsultatif etis dalam moral umum dan bersifat kerjasama dialogis untuk kemanusiaan dan kebangsaan, tanpa niat kristenisasi dan penginjilan Di sini titik koordinat untuk berdialog sebagai peran dan tugas kewarganegaraan Kristen, seperti digambarkan di bawah ini.

Hubungan Koordinasi Gereja dan Negara



Bagan di atas melihat titik koordinatnya di dalam perorangannya, antara warga negara sekaligus warga gereja, secara logis mengasumsikan semakin besar pemahaman akan kekristenan maka semakin tinggi atau semakin lebar titik koordinatnya. Paling ideal adalah keseimbangan pemahaman tentang negara dan gereja, sehingga kebaktian dan ketaatannya kepada pemerintah dapat serasi. Dengan pola di atas, dapat membantu pemahaman teologis warga gereja untuk bersikap dan bertindak secara politik.

Namun tidak semua gereja-gereja mau berpandangan demikian, karena ada yang berpaham subordinasi di antara keduanya, apakah itu Negara di bawah gereja dalam prinsip “dua pedang” atau Gereja di bawah Negara agar terlindungi Negara di dalam prinsip “dua Kerajaan”. Jadi kaum Injili menghindari prinsip subordinasi di antara kedua lembaga dalam saling menundukkan pada konflik kekuasaan

³² Abraham Kuyper, *Ceramah-Ceramah mengenai Calvinisme*, 113.

dan juga bukan terpolarisasi dalam paham penyangkalan hubungan sama sekali, karena natur keduanya dianggap berlawanan asalnya — dari Setan versus dari Allah—. Jadi, kedua dunia ini tidak selalu harus berkonflik termasuk di tingkat warga Negara dalam masyarakat, walau ada kebingungan dan kegamangan praktis.

Relasi Koordinasi sebagai Titik Temu Perjuangan Gereja

Khusus untuk negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, secara logis berimplikasi pada prinsip Negara sekuler dan bukan prinsip “bukan Negara agama dan bukan Negara sekular” seperti yang selama ini didengungkan sejak Orde Lama. Negara sekuler bukan berarti anti agama, karena banyak negara sekuler berdasarkan kebangsaan dan kemanusiaan tetap dapat mengedepankan prinsip-prinsip ketuhanan atau agama terpisah dari campur tangan berpolitik praktis. Selayaknya hanya ada dua bentuk pilihan: “Negara sekular” atau Negara agama” dalam semangat nasionalisme, mencakup semua umat beragama apapun dari negara bangsa tersebut. Prinsip teologis injili adalah agama terpisah dari politik dan peran gereja berbeda dari Negara dengan hubungan koordinasi dalam peran dan tanggungjawabnya. Jadi, harus memilih apakah negara berdasarkan agama atau berdasarkan prinsip-prinsip sekular.

Di sini termasuk suara kenabian gereja mengenai keadilan sosial bagi masyarakat dengan nilai-nilai etis Kerajaan Allah. Kenabian adalah tugas penting gereja modern yang direduksi dari ajaran-ajaran Alkitab secara keseluruhan bagi tugas marturia gereja. Marturia kenabian menyangkut keprihatinan, pemikiran, juga aksi kenabian pada situasi ketidakadilan yang ada di luar maupun di dalam gereja. Keberadaan nabi-nabi yang dipanggil Allah untuk memproklamasikan kembali hukum Torat langsung menunjuk sifat teokratis, seperti dalam pemerintahan Negara agama masa kini juga.

Reformed harus “to be claim a prophetic church and religion”³³. Selanjutnya seorang bernama Donald G Bloesch menekankan,

“Our choice today between a prophetic religion and a culture religion. The first is anchored in holy God who infinitely transcends every cultural and religious form that testified to him. The second absolutizes the cultural or mythological garb in which God supposedly meets us. Prophetic religions will keep a nation humble but at the same time hopeful, knowing that its destiny is the hands of a living and sovereign God. A cultural religion makes a nation vain and ultimately foolish . tempting it to yield to deception that god are in the ists power and service.”³⁴

Ini terkait dengan agama sebagai *priestic* (keimaman) saja yang mengandalkan fatwa dari atas kebawah dan dikuasai oleh orang-orang tertentu yang diakui sebagai pemimpin imam yang harus dipatuhi secara tradisional. Semuanya dibarengi dengan pengucilan sebagai hukuman atas ketidaktaatan. Untuk itu pentingnya dialog antara *critical social theory* dan *protestant prophetic imagination* seperti yang diusahakan Gary Simpson,³⁵ antara kondisi reformasi keagamaan yang mandeg dengan pelayanan kenabian injili yang wajar dalam gereja. Ini adalah dialog teologis bukan dialektika agama yang akan mensintesis dua hal keilmuan yang berbeda dan berlawanan.

Sebenarnya dalam pengertian teologis alkitabiah, kenabian Kristen bersifat integral dalam suatu usaha filosofis injili, dikerjakan sebagai jalan apologetis untuk pendaratan kebenaran-kebenaran Kristen pada konteks yang tantangan zaman atau jalan etis dalam mencari sesuatu kebajikan niscaya pada pergumulan dilematis

³³ Dirk Smith, “Can We Still Reformed? Question from South African” *Reformed Theology Identity and Ecumenicity*. Wallace M. Alston, Michael Walker, eds., (Grand Rapids: Wm. Eerdmans, 2003), 237.

³⁴ Donald G, Bloesch, *Freedom for Obedience Evangelical Ethics in Contemporary Time* (San Francisco: Harper & Row, 1987), 242.

³⁵ Paul Lakeland ‘Foreward’ dalam Gary Simpson, *Critical Social Theory: Prophetic Reason and Civil Society and Christian Imagination: Guides to Theological Inquiry* (Minneapolis: Fortress Press, 2002), vii.

masyarakat. Di sinilah eklesiologi injili dapat memikirkan pemikiran lanjutan dalam pergumulan setempat dan kekinian dari “rahim Asia” yang sangat banyak isu spesifik, seperti kemiskinan, perbudakan, gender, diskriminasi, emansipasi untuk bereklesiologi kenabian bagi masakini. Namun kesadaran injili belum muncul sepenuhnya bahkan diantisipasi sebagai kecenderungan tersesat.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik pentingnya panggilan kenabian sebagai suara kebenaran Allah yang berdampak dalam pembelaan kaum lemah di tengah-tengah penindasan dalam kehidupan riil. Untuk itu kaum injili biasanya menggumuli hal ini dari perspektif politik etis dan bukan politis praktis, karena tugas kenabian gereja bersifat rohani dan moral, bukan untuk kepentingan kekuasaan sesaat dan setempat. Jadi, suara kenabian gereja harus berdasarkan firman Injil di dalam pemberitaan gereja yang tugasnya diteruskan dari Kristus sebagai Kepala gereja dalam jabatan-Nya sebagai Nabi, berbarengan jabatan Raja dan Imam, bagi gereja.

Komunitas Kenabian untuk Pembelaan Ketidakadilan

Ada yang penting kita tangkap dari tulisannya tentang apakah pertama ia harus mengenali bahwa, “the task of prophet is ...nurture dan nourish and evoke a vision of an alternative to the dominant system. The prophet must generate hope for something that lies beyond the present order. We need a vision of an alternative future vision of possibilities that will make our blood run hot and give us the courage to revolt against the way things are”³⁶

Pembelaan keadilan dalam suara dan tindakan kenabian gereja yang utama adalah melayani sebagai hati nurani sosial dalam prinsip garam dan terang dari Injil Kerajaan. Jabatan kenabian gereja untuk mempertajam kesadaran sosial warga gereja dalam nilai-nilai Kerajaan Allah, di mana gereja bertindak sebagai referensi sosial, khususnya dari sudut etis. Prinsip “mercusuar” berdasarkan Injil Kerajaan, yaitu menghadirkan diri sebagai agen perubahan sosial:

³⁶ Tony Campolo, *Wake Up America: Answering God's Radical Call while Living in the Real World* (New York; Harper San Fransisco, 1991), 19.

melibatkan diri sendiri dalam kehadiran proses perubahan di masyarakat. Ini adalah perjuangan kebenaran dan keadilan dari gereja yang tertindas dan teraniaya disertai termaginalkan dalam masyarakatnya.

Hak inilah ide dasar dari keadilan dalam masyarakat manusia yang selanjutnya, dan dapat dipakai iman Kristen dalam pelayanannya kepada dunia sebagai prinsip: *saving justice* dan *loving justice*. Pertama, terkait dengan kebenaran (*righteousness of God*), yang kedua terkait dengan *mercy of God in Christ*³⁷. Di sinilah *justice* dalam kekristenan melampaui keadilan rasional ala John Rawl dan keadilan natural ala Stuart Mill. Karena keadilan Allah bersifat supranatural. Walau keduanya mencakup prinsip keadilan ilahi namun selalu harus diikuti oleh kasih pengampunan, bukan hanya kebenaran yang menghakimi dan menghukum. Dalam krisis dunia ini, tidak ada salahnya kaum injili bersama dengan yang lain dalam “new partnership” antara “conservative” dan “liberal” dalam “new social visions ... formed from all sectors of society... must involved everyone.”³⁸ Jacques Ellul pernah menegaskan hal menjadi Kristen dan sebagai “*revolusinary Christian*” di dalam dunia,

“ ... are not meant to live together in closed groups, refusing to mix with other the Christian community, must never be a closed body. Thus if Christian is necessarily *in* the world, his not *of* it. This means that his thought, his life, and his heart are not controlled by the world, and do not depend upon the world, for they belong to another Master.”³⁹

Ini yang juga dikenal kaum injili sebagai “terpisah dalam dunia namun tidak terisolasi dari dunia, dalam arti *menggetho*. Namun jelas tugasnya sebagai “garam dan terang dunia”, yang memelihara dan melindungi dunia dari tindakan luar, dan sebagai “pelita dunia” yang kehadirannya melenyapkan kegelapan dan memberi arah dan makna

³⁷ Ibid., 43 dst.

³⁸ Jim Wallis, *Who Speaks for Gods?*, 49.

³⁹ Jacques Ellul, *The Presence of The Kingdom* (New York: Seaburrry Press, 67), 9.

bagi masyarakat dan dunia. Dan juga sebagai “domba di tengah srigala” yang adalah tanda berkorban dan tidak mendominasi orang lain. Kesemuanya itu menunjukkan natur Gereja tidak sama dengan dunia, namun pada saat yang sama menolong dunia berdasarkan prinsip kebajikan Kristus.

Pada tahap tertentu memang dapat diterima bahwa “law needs the church” “...and morality can’t be taught to a society without religion.”⁴⁰ Itu ada benarnya, terkait panggilan kenabian masa kini sejalan dengan situasi dunia: “totalitarian wars, dictatorships, famine administratively organized the complete moral disintegration of social institution (like nation and family), and personal life (individual morality), the fabulous growth of wealth which does not help people at all, the enslavement or the greater part of humanity under the control of state, or of individual (capitalism), depersonalized of man both as a whole and at particular points—all this is only familiar.”⁴¹ Namun itu harus dimaknai melampaui agama menuju iman dalam menghadapi kerusakan peradaban global dan lokal, di sini gereja harus melakukan sesuatu namun sering tidak mau karena egoisme.

Perjuangan etis Kristen bukan berdasarkan perjuangan manusia semata-mata, tetapi berdasarkan pada ketundukan pada maksud Allah dalam nilai-nilai Injil Kerajaan. Kasih Allah bagi seluruh dunia harus mengalir dari gereja-Nya juga. Selama ini karya misioner Kristen ke ujung-ujung bumi hanya memperlihatkan superiorisme ekonomik dalam perhatian transaksional yang sering dituduh sandungan bagi penginjilan dan penghinaan terhadap Kristus dan gereja-Nya, serta kurang nilai etika kebajikan dan kemurahan pada kesejahteraan dan perdamaian manusia.

⁴⁰ Esther Byle Bruland, Stephen Charles Mott, *A Passion for Jesus A Passion for Justice* (Valey Forge: Judson Press, 1983), 92.

⁴¹ *Ibid.*, 31.

MENUJU EKLESIOLOGI PROFETIK PADA POLITIK ETIS

Perspektif etika sosial adalah sarana bagi eklesiologi injili untuk mengembangkan panggilan kenabian gereja-gereja di dalam krisis kemanusiaan. Artinya diperlukan perspektif etis bukan politis; yaitu unsur moral bersamaan dengan unsur sosial Injil Kerajaan.

Pentingnya Dimensi Etis dalam Eklesiologi Kekinian

Eklesiologi injili selama ini bersifat doktrinal dalam perdebatan konseptual antar denominasi gereja-gereja sehingga kurang membawa dimensi etis di dalam kajiannya yang holistik. Secara etis (baik sosial dan personal) isu-isu kemasyarakatan tidak terhindari oleh gereja-gereja lokal yang situasi, peristiwa, fakta-fakta bertempat tinggal di bumi yang sudah dikategorikan sebagai “gereja berjuang”. Di sini memang diperlukan sistem kajian etika sistemik dan sistematis dalam memahami ajaran Alkitab untuk mendapatkan kehendak dan isi hati Allah sebagai kerangka etika kebajikan yang niscaya. Bagi eklesiologi kekinian, sarana etis itu dipakai untuk mempertimbangkan dilema situasional dalam isu-isu kasuistik. Namun konteks situasional itu bukanlah seperti paham “etika situasi” Joseph Fletcher yang terjatuh ke dalam kemutlakan situasi dengan dalil kasih yang mutlak yang secara duniawi terdiri dari faktor *eros* dan *philia* yang berpamrih, bukan *agape* yang tulus ikhlas.

Pada titik kritis ini, warga gereja dalam “Ibadah yang benar” hanya terkait pada peribadatan sempit dalam liturgi formal, sama sekali tidak terkait inti ibadah ”yang mencakup penerapan kasih, keadilan, kebaikan, dan belaskasihan Allah dalam dunia ini”... “untuk menjadi pewujudan kehendak Allah dalam dunia.”⁴² Untuk itu gereja profetik sekarang, “harus berani untuk menjadi tidak lazim karena ia mengimitasi Yesus” karena “apa yang dunia cari adalah apa yang sungguh dapat diupayakan [oleh] orang otentik yang pernyataan imannya di dalam Yesus, [dan] ditopang pengorbanan yang penuh

⁴² Mark Lebberton, *Bahaya Ibadah Sejati: Sebuah Panggilan Memerangi Ketidakadilan*, terj., (Surabaya: Perkantas Jatim, 2011), 17, 18.

dengan kasih karunia, keadilan, dan belaskasihan.”⁴³ Ketidakadilan dalam bidang agama sangat dirasakan sekarang, walaupun mengklaim ide dasar demokrasi adalah kesetaraan hukum dan keadilan sosial dalam hal memberi masyarakat apa yang mereka butuhkan dan layak mereka dapatkan. Jadi, *justice* adalah “rational rather than impulsive or emotional walau dalam apa yang dikatakan justice as a fairness dalam dua prinsip equal liberty dan social economic sharing.”⁴⁴ Ini terkait prinsip “natural justice is not quantity but quality” yang juga bermakna “promoting the common Good for humanity.”⁴⁵ Atau dalam bahasa lain dari seorang non injili dikatakan “Justice requires equal treatment for all, because they are human being –whatever their differences.”⁴⁶ Ini adalah tanda keadilan dalam posisi kesetaraan dan kesamarataan perlakuan di dalam masyarakat yang adil.

Pentingnya beriman Kristen yang berkeadilan bagi orang lain, khususnya yang lemah dalam prinsip keadilan di dalam kebenaran Allah yang menyelamatkan dan dalam hal belaskasihan yang berkorban.

Tanggungjawab Etis Warga Gereja sebagai Rakyat

Gereja berelasi koordinasi dengan Negara secara selayaknya pada keberadaan warganegara sebagai titik koordinatnya dalam sifat konsultatif antar pemimpin gereja dan pejabat pemerintahan. Di sini perspektif teologis yang disarankan adalah prinsip “apolitical system deduced from the gospel” dengan cara “make the Kingdom of God into an ethical system by trying to outline the form in which it should be reproduced upon earth!”⁴⁷ Dalam hal ini, warga gereja harus

⁴³ Mark Labberton, *Dipanggil: Krisis dan Janji dalam Mengikuti Yesus pada Masakini*. terj. (Surabaya: Perkantas Jatim, 2015), 48, 49 dalam perkataan selanjutnya dia menyebutnya “panggilan kita adalah di sini dan hari ini”.

⁴⁴ *Ibid.*, 33.

⁴⁵ *Ibid.*, 43, 44.

⁴⁶ Brian Wren, *Education for Justice: Pedagogical Principles* (Maryknoll: Orbis Book, 1982), 32.

⁴⁷ Ellul, *The Presence of the Kingdom*, 55.

berperan aktif sebagai terang dunia di dalam peran dan tugas kenabian di dalam kerakyatan. Belajar dari pemikiran Aristoteles tentang Negara (polis) yang diejewantahkan dalam koinonia, di mana secara alamiah rakyat Kristiani sebagai “koinonia unik” mengharuskan keterlibatan dua aspek: persahabatan dan keadilan. Di sini yang terpenting dalam keadilan dan kebenaran demi kebahagiaan sebagai kebajikan tertinggi.

Pemahaman yang benar akan berita Kerajaan Allah yang seimbang antara keselamatan rohani dan keprihatinan sosial, seperti yang dicanangkan dalam Lausanne Covenant (1974) sebagai poin keprihatinan sosial yang sering terabaikan dalam misi injili, lalu dikembangkan lagi dalam Manila Manifesto (1989) dalam suatu tema besar “Whole Church” dan Whole World”, kemudian difokuskan lagi secara analitis dalam isu-isu kemanusiaan kristis menjadi (Capetown Commitment, 2000) dalam apa yang dikenal sebagai “Call to Action”. Amanat Agung tidak boleh hanya dilihat secara sempit pada mandat keselamatan belaka yang diperlawankan dengan mandat peradaban yang lebih besar untuk masa kini. Walau kenyataannya politik itu jahat dan kejam, tetapi mandat rohani gerejawi tidak boleh menghindari urusan-urusan sosial-politik warga gereja sebagai hal bukan rohani lalu menghindari jebakan politik sayap kanan ekstrim, ala Fundamentalisme Kristen dengan koalisi *moral majority* (seperti pengalaman beragama mayoritas Kristen Amerika). Kaum injili memang memastikan diri untuk menolak sekularisasi Injil menjadi “Injil sosial” yang beritanya terjerumus ke dalam politisasi Injil, belaka,⁴⁸ termasuk pada teologi pembebasan agama ala Marxisme yang berpolitik sayap kiri. Ekstrim kedua bersifat politik syariat agama ala teokrasi dan ekstrim pertama mengajak gereja berpolitik kekerasan senjata. Diduga, kedua konsep itu rawan diikuti dan diambil alih oleh minoritas Kristen di mana pun untuk membentuk

⁴⁸ Seperti disarankan para teolog radikal. Misalnya: Walter Rauschenbusch, *Theology for The Sosial Gospel* (Nashville: Abingdon, 1987), 1-10; lih juga Thomas J. J. Altizer, *The Gospel of Christian Atheism* (Philadelphia: Westminster/John Knox, 1964).

Parpol Identitas Kristen. Eklesiologi profetik etis adalah jalan moderat berdasarkan suara kenabian dapat dipertimbangkan untuk mengatasi kedua ekstrim tersebut.

KESIMPULAN

Ada tiga segmen yang saling terkait dari dimensi sosial gereja lokal, yaitu dunia, masyarakat, negara. Warga gereja di dunia yang berkonflik dan penuh dilema etis yang terimbas dalam kontroversi relasi subordinasi antara gereja dan Negara. Untuk itu pentingnya gereja-gereja Kristen mempunyai pemahaman komprehensif mengenai masyarakat dan pemerintahan dari perspektif sistem sosial.

Gereja-gereja harus menyadari kondisi dan situasinya secara prinsip-prinsip teologi, khususnya terkait dengan sejauh mana batas-batas tindakan sosial etis warga gereja atau lingkup yang lebih besar lagi adalah batas-batas fungsi rohani gereja-gereja dalam bermasyarakat. Sehingga secara individual Kristen dapat menghadapi suatu pemahaman dan penilaian moral yang didasari pada sistem etika yang memadai, khusus dalam menghadapi dilema bergereja dan berpolitik.

Secara ringkas suara kenabian gereja pada masa kini terdiri dari berita peringatan, penghukuman, penghiburan, dan pengharapan. Kurangnya pemahaman internal warga gereja mengenai hakikat Gereja dan peran kenabian pada fenomena ketidakadilan sebagai “peristiwa kenabian” pada masa kini. Kesadaran akan lemahnya pembelaan kepada orang-orang yang tertindas dan minoritas sambil mengusahakan kedamaian bagi semua orang, apapun golongannya. Ini dapat menjadi tanda bangkitnya kesadaran kenabian gereja karena pengalaman pahit yang dialami dalam ketidakadilan sosial, untuk mengaktualisasikan perannya, khususnya membela nasib orang tertindas, sama seperti gereja yang juga tertindas. Gereja harus terus melanjutkan berita kenabian ini, sebagai wakil Suara Kristus di dalam dunia. Tentu dalam pemberitaan kenabian mengandung penderitaan dan penganiayaan atas nama kebenaran Injil dalam membela orang profetik termasuk gereja sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bloesch, Donald G., *Freedom for Obedience Evangelical Ethics in Contemporary Time*. San Fransico Harper & Row, 1987.
- Bruland, Esther Byle and Stephen Sharles Mott. *A Passion for Jesus a Passion or Justice*. Valley Forge: Judson Press, 1983.
- Campolo, Tony. *Wake up America: Answering God's Radical Call while Living in the Real World*. New York; Harper San Fransisco, 1991.
- Carson, David A. (Dkk.) *Gereja Zaman Perjanjian Baru dan Masa kini*. Terj., Malang: Gandum Mas: 1997.
- Ellul, Jacques, *The Presence of The Kingdom*. New York: Seaburry Press, 1967.
- Esther, Byle Bruland, Stephen Charles Mott, *A Passion for Jesus A Passion for Justice* . Valey Forge: Judson Press, 1983.
- Gish, Arthur G. *The New Left and Christian Radicalism*. Grand Rapids: Wm Eerdmans Pub., 1970.
- Glenn H Stassen & David P Gushee, *Etika Kerajaan: Mengikuti Yesus dalam Konteks Masa Kini*. Terj., Surabaya: Momentum, 2008.
- Hanson and Hanson RPC. *The identity of the Church: A Guide to Recognizing the Contemporary Church*. London: SCM Press, 1987.
- Hudson, Neil. *Gereja Idaman Gereja Pemuridan*. Terj., Surabaya: Perkantas Jatim, 2017.
- Jim Wallis, *Who Speaks for Gods?*, New York: Delacorte Press, 1996.
- Kirkpatrick, Frank. *Community: A Trinity of Models*. Washington DC: Georgetown University Press, 1986.
- Lebberton, Mark. *Bahaya Ibadah Sejati: Sebuah Panggilan Memerangi Ketidakadilan*. Terj. Surabaya: Perkantas Jatim, 2011.

- _____. *Dipanggil: Krisis dan Janji dalam Mengikuti Yesus pada Masakini*. Terj. Surabaya: Literatur Perkantas Jatim, 2015
- Randall L. Frame & Allan Tharpe, *How the Rights is the Right? A Biblical Balance Approach*. Grand Rapid: Zondervan Pub. House, 1996.
- Siburian, Togardo. *Teologi Religionum [Misional]: Pendekatan Injili pada Agama-Agama Lain*. Bandung: STT Bandung: 2005.
- Sider, Ronald J. *Rich Christian in The Age of Hunger*. Downers Groove: InterVarsity, 1977.
- Snyder, Howard A *Global Good News: Mission in A New Context*. Nashville: Abingdon Press.1989.